

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR**

**AINUN ADHIRA KANIA**

**A021201129**



**DEPARTEMEN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**AINUN ADHIRA KANIA**

**A021201129**



Kepada

**DEPARTEMEN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

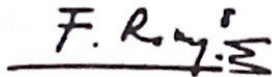
**AINUN ADHIRA KANIA**

**A021201129**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

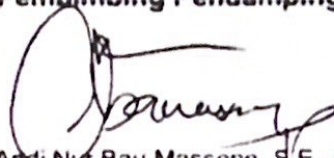
Makassar, 7 Mei 2024

**Pembimbing Utama**



Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP  
NIP. 196503141994031001

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Andi Nur Bau Massepe, S.E., M.M  
NIP. 197804282009121001

**Ketua Departemen Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin**



Dr. Andi Aswan, S.E., MBA., M.Phil  
NIP. 197705102006041003

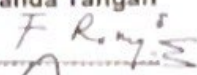

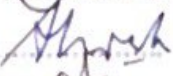

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh

**AINUN ADHIRA KANIA**  
A021201129

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 22 Mei 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP	Ketua	1. 
2.	Dr. Andi Nur Bau Massepe, S.E., M.M	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Abdul Rakhman Laba, S.E., MBA	Anggota	3. 
4.	Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, S.E., M.Si., WPPE., WMI, CRA, CBOA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Aswan, S.E., MBA, M.Phil  
NIP. 197705102006041003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Adhira Kania  
NIM : A021201129  
Departemen : Manajemen  
Program Studi : Strata Satu S.1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan adanya unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



Ainun Adhira Kania

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan KUR oleh UMKM di Kota Makassar"** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan strata 1 (S1) pada program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula memanjatkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap, menuju alam yang terang benderang ini.

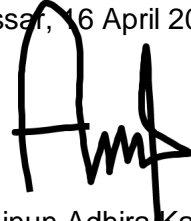
Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya dukungan serta doa dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan selesai. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani yang teramat besar kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi peneliti.
2. Sudirman Muhlis dan Kaspia S selaku orang tua yang peneliti cintai dan sayangi yang telah memberikan dukungan moril dan materil berupa doa yang tiada henti-hentinya, pengertian yang tidak terputus, dan kasih sayang sepanjang masa yang diberikan untuk peneliti selama ini.
3. M. Alif Supatra, Adzra Athifa Tabina, dan Adeeva Ayudia S selaku saudara(i) yang peneliti sayangi dan banggakan, terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan.
4. Bapak Dr. Andi Aswan, S.E.,MBA.,M.Phil. selaku Ketua Departemen Manajemen FEB UNHAS sekaligus pembimbing Akademik peneliti dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP selaku doan pembimbing utama dan Bapak Dr. Andi Nur Bau Masepe, S.E., M.M selaku dosen pembimbing pendamping yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing peneliti dari awal hingga akhir skripsi ini terselesaikan.

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rakhman Laba, S.E, MBA. selaku dosen penguji I dan Ibu Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, S.E., M.Si., WPPE., WMI., CRA., CBOA sebagai dosen penguji II peneliti.
7. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh staf administrasi akademik mahasiswa UNHAS.
8. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E.,M.Si.,CIPM,CWM,CRA,CRP selaku Dekan FEB UNHAS dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan yang bertanggung jawab terhadap administrasi akademik mahasiswa FEB UNHAS.
9. Seluruh dosen serta tenaga kependidikan yang bertanggung jawab terhadap administrasi akademik mahasiswa Manajemen FEB UNHAS.
10. Keluarga besar Kakek Muhammad dan Nenek Lenreng serta keluarga besar Kakek Sila dan Nenek Talla yang tidak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Sahabat dan teman seperjuangan peneliti, yaitu *Powerpuff girls*, *Always eat*, magang BI, Immaj FEB UH, Genbi Sulsel (Genbi Komsat Unhas, terkhusus teman-teman deputy pendidikan), Ab20lut, dan *volunteer BI Corner 2022*, yang telah memberikan doa, semangat, serta bantuan lain yang sangat berharga untuk peneliti.
12. Diri sendiri (Ainun Adhira Kania) yang telah berjuang dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas rasa semangat yang tidak pernah habis dan akan terus berjuang hingga akhir.
13. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner dan diwawancarai oleh peneliti.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas limpahan doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, aamiin.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran membangun untuk dijadikan perbaikan oleh peneliti di masa yang akan datang. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 16 April 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Ainun Adhira Kania



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH UMKM DI KOTA MAKASSAR**

#### ***Analysis of Factors Influencing MSMEs for Taking Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Makassar City***

Ainun Adhira Kania  
Fauzi R. Rahim  
Andi Nur Bau Masepe

KUR merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang akan disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan prosedur KUR terhadap minat UMKM di Kota Makassar dalam mengambil KUR. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan skala likert. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan KUR oleh UMKM di Kota Makassar serta tingkat inflasi dan prosedur KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan KUR oleh UMKM di Kota Makassar.

Kata Kunci: UMKM, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Prosedur KUR, Pengambilan KUR

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Factors Influencing MSMEs for Taking Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Makassar City***

Ainun Adhira Kania  
Fauzi R. Rahim  
Andi Nur Bau Masepe

*KUR is a government program to increase access to financing for MSMEs which will be channeled through financial institutions using a loan pattern. This research aims to see the influence of interest rates, inflation rates, and KUR procedures on the interest of MSMEs in Makassar City in taking KUR. This research uses quantitative methods using questionnaire instruments and Likert scales. Hypothesis testing was carried out using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results of the hypothesis test show that the interest rate has a negative and significant effect on taking KUR by MSMEs in Makassar City and the inflation rate and KUR procedures have a positive and significant effect on taking KUR by MSMEs in Makassar City.*

*Keyword: MSMEs, Interest Rates, Inflation Rates, KUR Procedures, Taking KUR*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
SKRIPSI .....	ii
SKRIPSI .....	iii
SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR ISTILAH .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Kegunaan Penelitian .....	18
1.5. Sistematika Laporan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1 Landasan Teori .....	20
2.1.1 Modal .....	20
2.1.2 Pengertian Bank .....	21
2.1.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	24
2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	28
2.1.5 Suku Bunga .....	30
2.1.6 Inflasi .....	31
2.2 Tinjauan Empirik .....	34
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....	37
3.1. Kerangka Konseptual .....	37
3.2. Hipotesis .....	37

3.2.1 Hubungan antara Tingkat Suku Bunga terhadap Pengambilan KUR .	37
3.2.2 Hubungan antara Tingkat Inflasi terhadap Pengambilan KUR.....	38
3.2.3 Hubungan antara Prosedur KUR terhadap Pengambilan KUR.....	38
BAB IV METODE PENELITIAN.....	39
4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian .....	39
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
4.2.1 Populasi .....	39
4.2.2 Sampel.....	39
4.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
4.4 Teknik Sampling.....	40
4.5 Teknik Pengumpulan Data .....	40
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	41
4.7 Instrumen Penelitian .....	43
4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	43
4.9 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.9.1 Uji Normalitas .....	44
4.9.2 Uji Multikolinearitas.....	45
4.9.3 Uji Heteroskedastisitas .....	45
4.10 Teknik Analisis Data.....	45
4.10.1 Statistik Deskriptif .....	45
4.10.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4.10.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
4.11 Uji Hipotesis.....	47
4.11.1 Uji Simultan (F).....	47
4.11.2 Uji Parsial (T).....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....	48
5.1 Hasil Penelitian.....	48
5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	48
5.1.2 Karakteristik Responden .....	50
5.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	53
5.1.3.1 Uji Normalitas.....	53
5.1.3.2 Uji Multikolinearitas .....	53
5.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54
5.1.4 Analisis Deskriptif.....	54
5.1.5 Pengujian Hipotesis .....	58
5.1.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	58
5.1.5.2 Analisis Regresi.....	59
5.1.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	60

5.1.5.4 Uji Simultan (F).....	61
5.1.5.5 Uji Parsial (T).....	61
5.2 Pembahasan .....	63
5.2.1 Berdasarkan Karakteristik Responden .....	63
5.2.2 Berdasarkan Pengujian Hipotesis .....	64
BAB VI PENUTUP .....	67
6.1 Kesimpulan .....	67
6.2 Saran.....	67
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Modal Per Bulan.....	9
1.2 Asal Modal Usaha.....	10
1.3 Penyalur KUR.....	12
1.4 Penggunaan KUR.....	14
1.5 Laju Inflasi dan BI Rate di Indonesia.....	17
2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	34
5.1 Hasil Uji Validitas.....	48
5.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	49
5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor UMKM.....	51
5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Pengambilan KUR.....	52
5.7 Uji Normalitas.....	53
5.8 Uji Multikolinearitas.....	53
5.9 Kriteria Analisis Deskriptif Item.....	55
5.10 Data Statistik Tingkat Suku Bunga (X1).....	55
5.11 Data Statistik Tingkat Inflasi (X2).....	56
5.12 Data Statistik Prosedur KUR (X3).....	56
5.13 Kategori Data Statistik Pengambilan KUR (Y).....	57
5.14 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
5.15 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
5.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	60
5.17 Uji Simultan (F).....	61
5.18 Hasil Uji Parsial (T).....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Infografis Bantuan OJK terhadap Pengembangan UMKM .....	5
1.2 Jenis Bidang Usaha .....	8
1.3 Jenis Usaha .....	8
1.4 Data Omset Perbulan .....	9
1.5 Data Profit Bulanan .....	10
1.6 Jumlah Perolehan KUR .....	11
1.7 Jumlah Besaran KUR .....	12
1.8 Jangka Waktu Pinjaman KUR .....	13
1.9 Administrasi KUR Memberatkan/Tidak .....	14
1.10 Bunga KUR Memberatkan/Tidak .....	15
1.11 Angsuran KUR Memberatkan/Tidak .....	15
1.12 Kredit yang Diterima Sesuai Kebutuhan/Tidak .....	16
2.1 Fungsi Bank .....	22
2.2 Kriteria Penerima, Tujuan, dan Kemudahan KUR .....	24
3.1 Kerangka Konseptual .....	37
5.1 Uji Heteroskedastisitas .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	72
2 Kuesioner .....	74
3 Tabulasi Data .....	77
4 Hasil Output SPSS.....	86
5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	92
6 Cek Plagiarisme (Turnitin) .....	93



## DAFTAR ISTILAH

NO	Istilah	Keterangan
1.	KUR	Kredit Usaha Rakyat
2.	UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3.	BPKB	Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
4.	Monev	Monitoring dan Evaluasi
5.	SBPU	Surat Berharga Pasar Uang
6.	PDB	Pendapatan Dalam Negeri
7.	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
8.	K/PMR	Kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/illegal.
9.	P2P	peer to peer
10.	Kredit	Pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada peminjam oleh pemberi pinjaman
11.	Securitas	Instrumen finansial dengan nilai tertentu yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap aset
12.	Crowdfunding	Urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.
13.	KPKU	Kriteria Penilaian Kriteria Uggul
14.	Kanwil	Kantor Wilayah
15.	Track Record	Rekam Jejak
16.	Survei	Teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan peninjauan.
17.	Investasi	Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
18.	Inflasi	Kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang
19.	Notaris	Orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya
20.	Agunan	Jaminan
21.	BI7DRR	<i>Bank Indonesia Seven Days Repo Rate</i>
22.	Ekuitas	Kepemilikan dalam bentuk nilai uang
23.	Paten	Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan (pembajakan)
24.	PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
25.	Margin	Persentase keuntungan
26.	Kreditur	Pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain.
27.	Angsuran	Besar nominal yang harus dibayar oleh debitur atau peminjam ke kreditur.
28.	Suku Bunga	Balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
29.	Holtikultura	Budidaya tanaman kebun

30.	Pembudidayaan	Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil.
31.	Konstruksi	Kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana.
32.	Real Estate	usaha yang berhubungan dengan jual beli tanah serta bangunan yang ada di atasnya
33.	KSP	Koperasi Simpan Pinjam
34.	USP	Usaha Simpan Pinjam
35.	Linkage	Hubungan antara lembaga keuangan formal dan informal.
36.	Gubernur	Kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
37.	Bupati	kepala daerah kabupaten di Indonesia.
38.	Wali Kota	Pemimpin yang tertinggi dari pada Pamong Praja didalam suatu daerah Haminte.
39.	Kebijakan Moneter	Sistem control bank sentral terhadap besaran moneter.
40.	Fixed	Tetap
41.	Floating	Mengambang
42.	Flat	Datar
43.	Anuitas	Penerimaan dan pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
44.	Likuiditas	Efisiensi atau kemudahan perubahan aset menjadi uang yang merefleksikan nilai intrinsik aset itu sendiri.
45.	BPS	Badan Pusat Statistik
46.	Indikator	Alat ukur untuk mengevaluasi keadaan atau status perubahan yang terjadi.
47.	IHK	Indeks Harga Konsumen
48.	Demand	Permintaan
49.	Empiris	Pengamatan yang dilakukan secara langsung.
50.	Domestik	Dalam negeri
51.	Hipotesis	Anggapan dasar/sementara
52.	Populasi	Sebagai seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam satu wilayah atau daerah.
53.	Elemen	Bagian dasar yang mendasari sesuatu
54.	Sampel	Sebagian anggota dari populasi
55.	Multivariate	Teknik pengumpulan data yang menganalisis lebih dari dua variabel
56.	R	Rumus Roscoe
57.	N	Variabel
58.	<10	Dikalikan paling Kecil 10
59.	Kualitatif	Metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.
60.	Kuantitatif	Metode pengambilan data dalam jumlah yang banyak.
61.	Primer	Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan
62.	Sekunder	Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obejeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan
63.	Kuesioner	Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

64.	Studi Pustaka	Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori yang terdapat pada media cetak.
65.	Probability	Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel
66.	Non-probability	Teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti, bukan pemilihan acak. Ini adalah metode yang tidak terlalu ketat.
67.	Skala Likert	kala pengukuran data kuantitatif yang didapatkan/ditemukan pada angket saat melakukan survei tentang apa yang diteliti.
68.	Administrasi	Seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
69.	Validitas	Suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti
70.	Reliabilitas	Indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
71.	Statistika	Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data.
72.	Statistik	Data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala.
73.	Mean	Rata-rata
74.	Minimum	Nilai terkecil
75.	Maksimum	Nilai terbesar
76.	Sum	Penjumlahan data
77.	Average	Nilai tengah
78.	Range	Jangkaun
79.	Kurtoris	Ukuran statistik yang menggambarkan distribusi data dalam suatu sampel.
80.	Skewness	Ukuran kemiringan
81.	Kuartil	Suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi empat bagian sama besar.
82.	Desil	Suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar.
83.	Standar Deviasi	Simpangan baku
84.	Y	Pengambilan KUR
85.	a	Konstanta
86.	$\beta$	Koefisien regresi
87.	X1	Tingkat suku bunga
88.	X2	Tingkat inflasi
89.	X3	Prosedur KUR
90.	e	Residual atau nilai eror
91.	Uji Parsial	Menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
92.	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	Alat ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
93.	Analisis Regresi Linier Berganda	Modal regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas.

94.	Signifikan	Berarti
95.	Person Product Moment	Jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan 2 variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1.
96.	Cronbach Alpha	Alat ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
97.	R tabel	Tabel berisi angka yang digunakan untuk menguji berbagai kemungkinan hasil validitas data penelitian.
98.	R hitung	Nilai-nilai yang berada dalam kolom "corrected item total correlation".
99.	Korelasi	Keeratan antar variabel
100.	Responden	Orang yang memberikan tanggapan dari sebuah penelitian.
101.	Frekuensi	Ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu.
102.	Persentase	Rasio atau angka yang dinyatakan dalam pecahan dari 100
103.	Variabel	Suatu sebutan yang bentuknya dapat diberi nilai angka (kuantitatif) atau nilai mutu (kualitatif).
104.	Interval	Jarak
105.	T hitung	Digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak.
106.	T tabel	Jenis tabel distribusi yang berfungsi untuk menentukan sebuah hipotesis.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Modal memiliki peranan penting dalam menjalankan sebuah bisnis sehingga, modal menjadi penentu keberlangsungan hidup usaha itu sendiri. Modal yang ada di dalam suatu perusahaan atau badan usaha dapat meningkatkan proses produksi dan distribusi dari produk itu sendiri selain itu, dukungan dari adanya teknologi yang mumpuni menjadikan modal usaha bukan hanya dijadikan sebagai alat untuk mencatat distribusi dan produksi yang tepat namun dapat menjadi sebuah alat untuk memaksimalkan teknologi dengan melakukan inovasi dan kreatifitas agar tidak tertinggal dengan tren yang ada.

Lembaga keuangan yang memiliki tugas dalam mengatur, menghimpun, dan menyalurkan dana ke masyarakat sangatlah dibutuhkan. Tugas ini dijalankan oleh bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam meminjam dana. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan bank dapat dikatakan baik jika mampu menghimpun dana dengan sebaik mungkin, baik itu dalam hal menyalurkan atau mengoperasikan dana itu sendiri.

Kelancaran aktivitas perbankan sangat bergantung kepada kecukupan dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri sehingga dana ini harus mendapatkan perhatian oleh bank. Dana yang digunakan oleh bank pun harus di alokasikan sebagaimana mestinya dengan efektif dan efisien untuk itu sumber dana untuk bank sangat perlu diperhatikan. Sumber dana dari bank pun bermacam-macam, diantaranya:

- a. Modal sendiri. Modal ini merupakan setoran dari pemegang saham bank tersebut. Modal atau dana ini dapat diperoleh dari pemegang saham baru atau pemegang saham lama bahkan modal dari pemegang saham dapat menjadi cadangan laba bagi bank itu sendiri.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) Simpanan giro.
  - 2) Simpanan tabungan.
  - 3) Simpanan deposito

- c. Dana yang bersumber dari lembaga lain, seperti kredit likuiditas dari BI, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Penggunaan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kredit kepada masyarakat akan mengakibatkan tingkat likuiditas bank lebih rendah berbanding dana tersebut dimanfaatkan sebagai cadangan primer atau cadangan sekunder. Meskipun demikian pihak bank akan tetap menyalurkan dana yang ada dalam bentuk kredit karena penyaluran kredit ini merupakan sumber utama pendapatan bank walaupun tindakan ini beresiko. Penyaluran kredit ini dilakukan oleh pihak bank kepada individu atau kepada bank lainnya.

Penyaluran dana oleh bank dapat berupa kredit. Salah satu penyaluran dana berupa kredit, yaitu produk layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk membantu mempermudah akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal. Menurut Aristanto (2019), Program KUR dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pemerintah membentuk Komite Kebijakan KUR. Komite Kebijakan KUR dan Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam melakukan sosialisasi program KUR. Menurut Damayanti dan Adam (2015), beberapa lembaga pemerintah antara lain seperti, BPKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia telah mengalokasikan pendanaan dan program untuk mensosialisasikan program KUR.

Indikator yang menjadi pendukung percepatan penyakuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah mengoptimalkan peran dari Pemerintah Daerah. Menurut Arisanto (2017) hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, khususnya berbagai program nasional yang telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Menteri dalam negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang KUR tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim money KUR. Melalui surat edaran tersebut, menegaskan tugas pemerintah daerah:

- a. Melakukan *upload* data calon penerima potensial untuk dapat dibiayai KUR di dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan

penganggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- b. Melakukan identifikasi data calon penerima KUR yang di *upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- c. Mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerimaan KUR di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah dan pemerintah dan pelayanan pada publik sangatlah bergantung pada kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Indikator lain yang menjadi sangat penting dalam keberhasilan dari penyaluran KUR adalah sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh beberapa faktor. Baik didukung oleh faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kontribusi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, terdapat 5.387 pelaku UMKM di Kota Makassar per-tahun 2019 (Vania, Annisa. 2022 (4)). Melihat banyaknya UMKM yang ada di Kota Makassar, tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan UMKM memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian kota bahkan negara. Untuk itu pemaksimalan terkait dengan UMKM harus dilakukan dengan baik dan benar. Beberapa kontribusi UMKM pada perekonomian di Indonesia:

- a. Menyumbang 60,51% dari total PDB Indonesia.
- b. Menyerap 117 juta tenaga kerja (97% total tenaga kerja Indonesia).
- c. Terdapat 64 juta pelaku UMKM (99,99% dari total pelaku usaha).
- d. Nilai Ekspor 15,7% total ekspor non migas Indonesia.

Selain itu ada beberapa dukungan OJK terhadap pengembangan UMKM diantaranya:

- a. Pembiayaan
  - 1) Meluncurkan kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR):
    - a) 64 skema program KPMR
    - b) Jumlah debitur: 104,7ribu debitur

- c) Nilai penyaluran kredit: Rp966,58 miliar
  - 2) Mendorong digitalisasi pembiayaan melalui *fintech Lending (P2P Lending)*:
    - a) 107 Perusahaan *P2P Lending*
    - b) Nilai pembiayaan Rp26,9 triliun
  - 3) Membentuk KUR klaster dalam satu ekosistem digital:
    - a) KUR klaster Pertanian di Lampung (Kartu Petani Berjaya)
    - b) KUR klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur
    - c) KUR klaster Jaring di Malang
  - 4) Membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM)
    - a) 61 BWM
    - b) 47,9 ribu nasabah
    - c) Jumlah pembiayaan Rp72,6 miliar (Per 27 September 2021)
  - 5) Mendorong alternatif pendanaan UMKM melalui *Securities Crowdfunding*:
    - a. 7 Penyelenggara
    - b. 176 Penerbit dari Pelaku UMKM
    - c. Rp362,07 miliar Dana yang dihimpun
    - d. 34.675 Investor (Per 30 September 2021)
  - 6) Mendukung program Digital Kredit UMKM (DigiKU) untuk membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan.
- b. Pemasaran
- 1) Membangun *platform* pemasaran UMKM digital melalui UMKMMU:
    - a) 1.125 UMKM
    - b) 1.412 kurasi Produk Unggulan di platform UMKM
  - 2) Digitalisasi Pemasaran BWM melalui aplikasi BWM-Bumdes.
- c. Pembinaan/Pendampingan UMKM
- 1) Bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) perluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM.
  - 2) Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI)
    - a) Fasilitas pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital.
    - b) Perluasan akses pembiayaan UMKM.
    - c) Pendampingan dan Pembinaan UMKM.
    - d) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan UMKM
  - 3) *Business Matching* UMKM dengan lembaga jasa keuangan.



- 4) Fasilitas pendirian Kampus UMKM dengan fokus program:
  - a) Program edukasi yang berkesinambungan
  - b) Penyaluran pendanaan
  - c) Pemasaran *online*
  - d) Sistem pembayaran dan logistik
  - e) Penyaluran program unggulan berbasis ekspor



Gambar 1.1 Infografis Bantuan OJK terhadap Pengembangan UMKM (Sumber: ojk.go.id)

UMKM sebagai penyumbang dalam perekonomian nasional membutuhkan berbagai macam dukungan, khususnya jika dilihat dari aspek permodalan. Melihat jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak. Jumlah ini tentunya akan menjadi potensi besar bagi pengembangan penyaluran kredit perbankan. Melihat potensial sebesar ini, Bank Umum memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan kredit kepada UMKM.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan di atas, tidak semua Bank Umum memiliki keahlian dan infrastruktur dalam menasar sektor UMKM. Dengan adanya peluang ini digunakan untuk menjalin kerjasama antar Bank Umum

dengan BPR untuk melayani sektor UMKM melalui Kerjasama Perbankan Kredit UMKM (KPKU) mengingat penyaluran KPKU diperhitungkan dalam mencapai batas maksimum jumlah kredit pada sektor UMKM terkait.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Salah satu program yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM adalah melaksanakan program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga keuangan berangkat dari kebutuhan UMKM untuk mendapatkan modal tambahan dalam menjalankan usaha. Tentunya setiap bank maupun lembaga keuangan memiliki ketentuan atau persyaratan dalam memberikan pembiayaan tersebut.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengemngangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan pada tahun 2007 dengan menerapkan skema imbal jasa penjamin, pada tahun 2014 pemerintah menghentikan penerapan KUR skema imbal jasa penjamin dan mengevaluasi program KUR yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh masih tingkat suku bunga yang tinggi dan menjadi beban bagi para debitur KUR, selain itu kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendorong program KUR. BPK juga menilai program KUR yang berjalan, tidak tepat sasaran karena tidak adanya data debitur secara detail.

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan, KUR kembali dikeluarkan pada bulan Agustus 2015 dengan beberapa perubahan, yaitu:

- a. Subsidi imbal jasa penjamin diubah oleh pemerintah menjadi subsidi bunga.
- b. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menjadi bagian pendukung sistem informasi dalam penatausahaan dan pengelolaan KUR.
- c. Pemerintah daerah turut andil dalam mendukung program KUR dengan melakukan pembinaan dan input data UMKM ke SIKP.

d. Adanya Forum Koordinasi Pengawas KUR yang diketuai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan terdiri dari beberapa inspektorat jenderal di beberapa kementerian.

Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Jenis KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas KUR Mikro, KUR Kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR Khusus, dan KUR super mikro. Penyaluran KUR lebih diprioritaskan pada sektor produksi yang meliputi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan pariwisata, sektor jasa produksi, dan/atau sektor produksi lainnya.

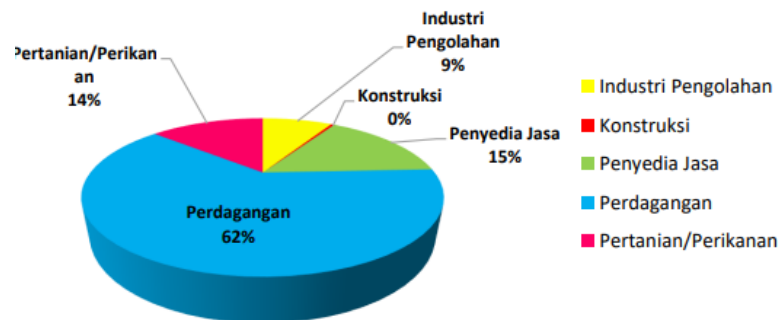
Permasalahan penyebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sering terjadi adalah *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet. NPL merupakan kondisi pemberian kredit dimana debitur tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rafaella & Prabowo (2022) pada pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. unit Rungkt Surabaya di masa *covid-19*, kredit macet dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa *overcrediting*, kekeliruan menganalisis, dan adanya rasa iba. Faktor eksternal dipengaruhi oleh risiko bisnis, bencana alam dan non alam, dan individu (nasabah) itu sendiri.

Menurut Hariyani (2008) dalam Jurnal "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet" oleh Nursyahriana dkk (2017), kredit macet terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, dan lemahnya informasi kredit macet. Faktor eksternal berupa kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Pada survei yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah berpartisipasi dalam melakukan survei debitur KUR dengan jumlah total responden yang berhasil disurvei adalah 1310 responden. Adapun di bawah ini beberapa indikator yang dimasukkan dalam survei tersebut, diantaranya:

Indikator-indikator dalam melakukan survei KUR, diantaranya:

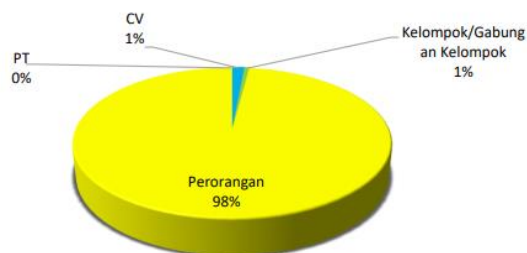
### a. Jenis Bidang Usaha



Gambar 1.2 Jenis Bidang Usaha  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Pada gambar di atas dapat dilihat dari 1310 responden, sebanyak 62% debitur KUR yang menggunakan fasilitas KUR di bidang non produksi (Perdagangan), sedangkan sebanyak 38% debitur di sektor lainnya bergerak di bidang usaha penyedia jasa (15%), bidang pertanian/perikanan (14%), bidang industry pengolahan (9%), dan bidang konstruksi (0,4%).

### b. Badan Usaha



Gambar 1.3 Jenis Usaha  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Pada Gambar 1.3 di atas, sebanyak 98% usaha debitur KUR dalam bentuk perseorangan dengan penyertaan modal debitur dari debitur sendiri, sebanyak 1% merupakan usaha milik kelompok/gabungan kelompok dimana salah satu contoh bentuk kelompok disini adalah Pengadaaan, sedangkan untuk 1% lainnya merupakan bentuk badan usaha CV.

### c. Jumlah Modal Per Bulan

Debitur dalam menjalankan sebuah usaha membutuhkan modal dengan jumlah variatif perbulannya, dari mulai di bawah Rp5.000.000 - Rp50.000.000. Berdasarkan survei monitoring dan evaluasi yang telah

dilakukan, adapun sebaran jumlah modal perbulan yang dibutuhkan oleh Debitur dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

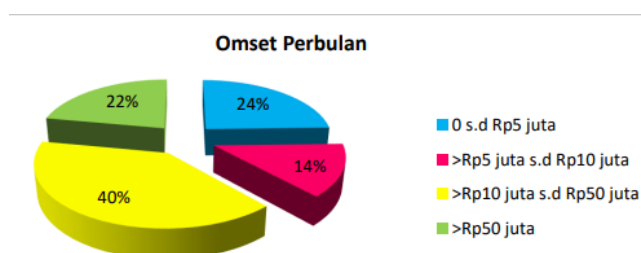
Tabel 1.1 Jumlah Modal Per Bulan

No	Modal	Jumlah Responden (Debitur)	%
1.	0 s.d Rp5.000.000	480	37%
2.	>Rp5.000.000 s.d Rp10.000.000	192	15%
3.	>Rp10.000.000 s.d Rp50.000.000	393	30%
4.	>Rp50.000.000	232	18%
5.	Tidak Valid	12	1%
TOTAL		1310	100%

(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Dapat dilihat pada Tabel 1.1, sebanyak empat ratus delapan puluh responden (37%) survei KUR di Semester I ini membutuhkan modal sampai sama dengan Rp5.000.000, dimana debitur KUR yang membutuhkan modal ini bergerak dalam sektor perdagangan maupun non perdagangan. Terdapat dua ratus tiga puluh dua responden (18%) yang membutuhkan modal lebih dari Rp50.000.000 (> Rp50 juta) yang didominasi oleh Sektor Perdagangan, dengan kepemilikan tidak hanya badan usaha dalam bentuk perseorangan tetapi juga dalam bentuk CV, adapun yang kepemilikannya merupakan kelompok/gabungan kelompok bergerak dalam Sektor Non Perdagangan.

#### d. Omset Perbulan

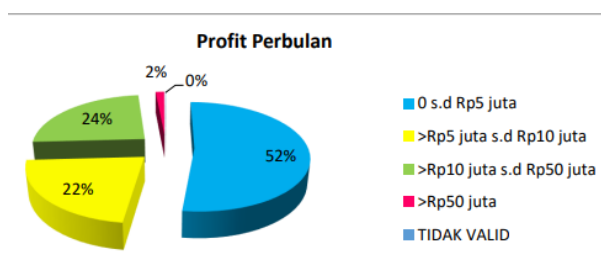


Gambar 1.4 Data Omset Perbulan  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Berdasarkan Gambar 1.4, diketahui bahwa dari seribu tiga ratus sepuluh responden survei KUR, sebanyak 40% debitur memiliki omset perbulan pada rentang Rp10.000.000 - Rp50.000.000, sekitar 24%

memiliki omset perbulan < dari Rp5.000.000, dan 14% debitur mendapat omset pada rentang Rp5.000.000 - Rp10.000.000. Hal ini dilandasi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 6, dijelaskan bahwa usaha Debitur yang memiliki omset usaha per tahun tidak lebih dari sampai dengan Rp300.000.000 diklasifikasikan sebagai usaha Mikro. Hal ini tergambar pada Debitur Survei KUR ini, bahwa sebagian usaha Debitur KUR yang dilakukan survei saat ini merupakan tergolong usaha Mikro.

e. Profit Per Bulan



Gambar 1.5 Data Profit Bulanan  
(Sumber: Laporan Moneyv KUR Semester 1 2021)

Omset Perbulan 40% debitur mampu mencapai omset pada rentang Rp10.000.000 - Rp50.000.000 tidak berbanding lurus dengan mayoritas profit yang dihasilkan oleh Debitur dalam 1 (satu) bulan. Berdasarkan gambar 1.5, sebanyak 52% debitur hanya mampu menghasilkan profit perbulan < Rp5.000.000. 22% responden mampu mendapatkan profit > Rp5.000.000 atau sampai Rp10.000.000. Hanya sekitar 2% debitur yang mampu menghasilkan profit > Rp50.000.000 perbulannya.

f. Asal Modal Usaha

Tabel 1.2 Asal Modal Usaha

No	Asal Modal	Jumlah Responden (Debitur)	%
1.	Modal Sendiri + Pinjaman KUR	617	47%
2.	Pinjaman KUR	490	37%
3.	Modal mandiri	167	13%
4.	Pinjaman Bank Selain KUR (Komersial)	4	0%

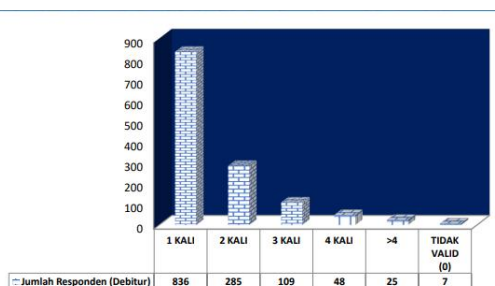
Lanjutan Tabel 1.2...

5.	Pinjaman Bukan Bank (Tetangga, Koperasi, Rentenir, dll)	3	0%
6.	Modal Sendiri + Pinjaman Bank Selain KUR	5	0%
7.	Banyak Sumber	24	2%
		1310	100%

(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa sebanyak 617 Debitur (47%) mendapatkan modal dari uang/barang pribadi mereka yang ditambahkan dengan pinjaman KUR. Selain kombinasi dari Modal sendiri dan Pinjaman KUR, terdapat Debitur yang memang sepenuhnya menggunakan Pinjaman KUR sebagai modal usaha mereka, yaitu sebanyak 37% dari populasi Survei KUR. Sumber modal Debitur lainnya cukup bervariasi, ada yang memang dari modal mereka sendiri, ada yang melalui pinjaman komersial, ada juga yang memperoleh modal usahanya dari pinjaman Bukan Bank (seperti Koperasi, Tetangga, dan Rentenir), dan ada juga yang mendapatkan modalnya dari gabungan semuanya atau banyak sumber yang disebutkan sebelumnya.

g. Berapa kali Debitur Memperoleh KUR

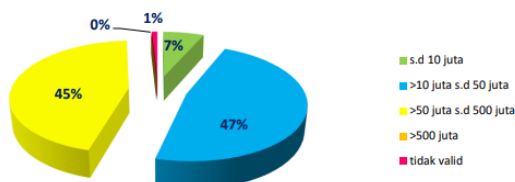


Gambar 1.6 Jumlah Perolehan KUR  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Pada gambar 1.6 sebanyak delapan ratus tiga puluh enam responden (64%) merupakan debitur yang baru pertama kali memperoleh KUR, sebanyak dua ratus delapan puluh lima debitur (22%) Memperoleh KUR untuk kedua kalinya, sebanyak seratus Sembilan debitur sudah memperoleh KUR sebanyak tiga kali dan ada juga responden yang sudah berulang kali (lebih dari tiga kali) memperoleh KUR. Adanya banyaknya debitur yang sudah berulang kali menggunakan fasilitas KUR ini mengindikasikan bahwa debitur memiliki *track record* yang baik di

database penyalur, sehingga Penyalur kembali menawarkan program ini kepada Debitur yang *existing*. Diharapkan kedepannya Penyalur mampu menjangkau calon-calon Debitur baru yang layak mengikuti program KUR ini.

#### h. Besaran KUR



Gambar 1.7 Jumlah Besaran KUR  
Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021

Berdasarkan gambar 1.7, sebanyak 47% responden merupakan debitur KUR Mikro dengan jumlah yang diberikan di atas Rp10.000.000 – Rp50.000.000.- KUR Kecil memiliki 45% dari populasi responden Survei dengan jumlah di atas Rp50.000.000 – Rp500.000.000. Pada survei ini masih ada Debitur KUR yang memperoleh KUR dengan klasifikasi sebagai KUR Super Mikro dimana jumlah pinjaman KUR untuk setiap Penerima KUR paling banyak Rp10.000.000.

#### i. Nama Penyalur KUR

Tabel 1.3 Penyalur KUR

No	Nama Penyalur	Jumlah Responden (Debitur)	%
1.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	540	41%
2.	Bank Mandiri	296	23%
3.	Bank Negara Indonesia (BNI)	209	16%
4.	Bank Tabungan Negara (BTN)	20	2%
5.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	12	1%
6.	Bank Pembangunan Daerah	213	16%
7.	Bank Swasta (BCA)	4	0%



Lanjutan tabel 1.3....

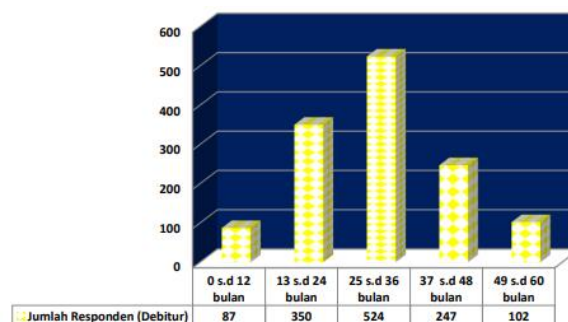
No	Nama Penyalur	Jumlah Responden (Debitur)	%
8	Tidak Valid	16	1%
		1310	100%

(Sumber: Laporan Moneyv KUR Semester 1 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) didominasi oleh penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebanyak lima ratus empat puluh (41%) dari Bank Rakyat Indonesia, kemudian sebanyak dua ratus Sembilan puluh enam (23%) dari Bank Mandiri, diikuti oleh Bank Negara Indonesia dengan jumlah yang disalurkan sebanyak dua ratus Sembilan atau sekitar 16% dan Bank Tabungan Negara dengan hanya 2% dari populasi. Penyalur yang ada bukan hanya dari Himbara, melainkan ada dari Bank Pembangunan Daerah yang turut serta menjadi Penyalur KUR sebanyak 16%, selebihnya beberapa responden memperoleh KUR dari Bank Swasta seperti Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia. Adapun sebanyak 16 Responden tidak memberikan informasi dengan valid dikarenakan menyebutkan nama orang bukan nama penyalurnya.

j. Jangka Waktu KUR

Jangka waktu penyaluran KUR sangat perlu diperhatikan. Jangka waktu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengakomodir tentang petunjuk pelaksanaan KUR. Berikut sebaran jangka waktu peminjaman KUR pada responden Survei KUR di semester 1 tahun 2021, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.8 Jangka Waktu Pinjaman KUR  
(Sumber: Laporan Moneyv KUR Semester 1 2021)

k. Penggunaan KUR

Pada survei ini disajikan gambaran penggunaan pinjaman KUR, diantaranya:

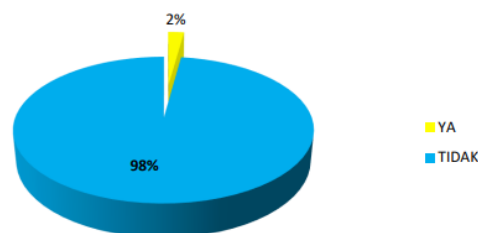
Tabel 1.4 Penggunaan KUR

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Responden (Debitur)
1.	Membeli Bahan Baku	927
2.	Investasi (Membeli peralatan, mesin, dll)	503
3.	Konsumsi	110
4.	Keperluan lainnya	365

(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Berdasarkan tabel 1.4, penggunaan pinjaman KUR lebih banyak digunakan untuk membeli bahan baku, diikuti oleh melakukan investasi atau membeli peralatan, dan lainnya.

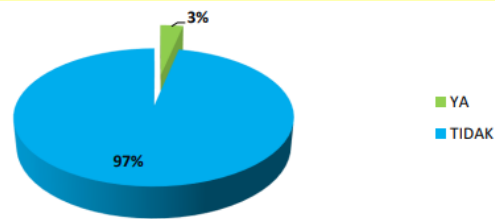
l. Administrasi KUR yang Memberatkan/Tidak



Gambar 1.9 Administrasi KUR Memberatkan/Tidak  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Pada gambar 1.9 di atas ketahui bahwa 98% dari seluruh responden survei menganggap administrasi yang diberlakukan dalam mengajukan pinjaman KUR tidak memberatkan, sedangkan 2% lainnya masih ada administrasi yang memberatkan untuk mereka. Adapun hal yang memberatkan diantaranya adalah biaya admin dan notaris yang cukup besar, debitur yang tidak memiliki sertifikat dan hanya ada sertifikat a.n. orangtua, maka diperlukan tanda tangan dari seluruh ahli waris, namun dikarenakan ada 1 orang yang tidak dapat hadir maka diproses dengan biaya notaris dibebankan 2 kali, tidak boleh memiliki pinjaman di tempat lain, adanya tambahan jaminan yang tidak sesuai aturan KUR yang tanpa jaminan, dan lain sebagainya.

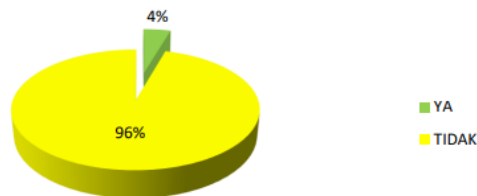
m. Bunga KUR Memberatkan/Tidak



Gambar 1.10 Bunga KUR Memberatkan/Tidak  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Hasil Survei KUR Semester I ini, didapatkan hasil bahwa dari seluruh responden, masih ada empat puluh tiga debitur (3%) yang menganggap bunga KUR memberatkan. Hal ini terjadi pada saat pandemic covid-19, sehingga menyebabkan perekonomian belum stabil yang berakibat pada turunnya omset dari debitur itu sendiri.

n. Angsuran KUR Memberatkan/Tidak

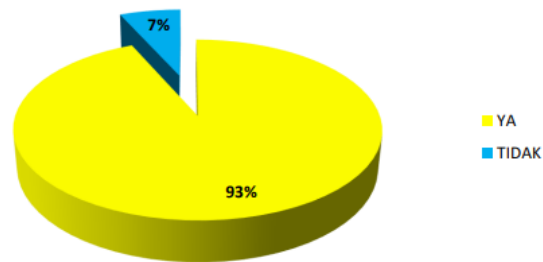


Gambar 1.11 Angsuran KUR Memberatkan/Tidak  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Berdasarkan gambar 1.11, sebanyak lima puluh delapan debitur (4%) yang menganggap bahwa angsuran pinjaman KUR yang harus dibayar cukup memberatkan, adapun alasan angsurannya memberatkan bagi debitur, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pandemi Covid-19, sehingga penghasilan debitur tidak dan terjadi penurunan omset.
- 2) Besaran bunga dengan besaran usaha tidak sebanding.
- 3) Adanya biaya tambahan sebesar Rp100.000 dari setoran pokok (tabungan investasi).
- 4) Usaha yang tutup/bankrupt

o. Kredit yang Diterima Sesuai Kebutuhan



Gambar 1.12 Kredit yang Diterima Sesuai Kebutuhan/Tidak  
(Sumber: Laporan Monev KUR Semester 1 2021)

Berdasarkan gambar 1.12, diketahui bahwa sebanyak seribu dua ratus dua puluh tiga responden (93%) menganggap bahwa pinjaman kredit sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka, namun ada sekitar delapan puluh tujuh responden (7%) yang menganggap pinjaman kredit yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Beberapa keterangan debitur atas jumlah kredit yang diterima tidak sesuai kebutuhan, diantaranya:

- 1) Terdapat biaya admin dan dana dibekukan dari penyalur.
- 2) Besaran kredit yang bisa diterima relatif kecil.
- 3) Adanya kebutuhan lainnya dalam membangun usaha Debitur, seperti peralatan, bahan baku, tempat, dan lain-lain.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan dengan tujuan mengembangkan UMKM. Dari hasil survei dapat dilihat ada berbagai indikator yang diukur. Beberapa indikator seperti tingkat suku bunga, persyaratan penyaluran KUR, dan jumlah angsuran KUR dapat menjadi faktor-faktor penentu UMKM dalam menggunakan KUR. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anjani & Purnamasari (2023) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengajuan KUR Super Mikro pada Masa Pandemi Covid-19”. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa kemudahan dalam memperoleh KUR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam mengambil kredit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Imaningsih (2022), menunjukkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR bagi UMKM pada PT. Bank

Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020. Dari tabel 1.6, dapat dilihat tingkat inflasi dan suku bunga acuan dari tahun 2022 dan 2023. Keduanya merupakan indikator yang berbanding terbalik, namun dapat menjadi penentu UMKM dalam menggunakan KUR.

Tabel 1.5 Laju Inflasi dan BI Rate di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inflasi</b>	3.0%	3.0%
<b>BI7DRR</b>	5,50%	5,75%

(Sumber: bi.go.id)

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti variabel-variabel terkait penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan variabel tingkat suku bunga, inflasi, dan kemudahan dalam memperoleh KUR dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penentu UMKM dalam Menggunakan KUR di Kota Makassar pada Tahun 2022-2023.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang timbul, adalah sebagai berikut:

- a. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar?
- b. Apakah tingkat inflasi berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar?
- c. Apakah prosedur KUR berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat suku bunga berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui tingkat inflasi berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar.

- c. Untuk mengetahui prosedur KUR berpengaruh dalam menentukan minat UMKM dalam menggunakan KUR di Kota Makassar.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan referensi terkait faktor-faktor penentu UMKM dalam mengambil KUR yang dapat digunakan oleh peneliti setelahnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memiliki lembaga keuangan penyedia KUR dengan tingkat suku bunga dan kemudahan penyaluran yang terbaik.

#### **1.5. Sistematika Laporan**

Hasil dari Penelitian ini dilaporkan dalam bentuk proposal dengan penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori terkait bank, UMKM, KUR, pendapatan dan tinjauan empirik.

##### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL**

Bab ini terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

##### **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

##### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB VI**

Bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Modal

Secara umum dapat dikatakan modal merupakan komponen terpenting dalam menjalankan bisnis dan membiayai pertumbuhan bisnis tersebut di masa depan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (*capital*). Dikutip dari Investopedia, modal adalah istilah luas yang dapat menggambarkan segala hal yang memberikan nilai atau manfaat kepada pemiliknya. Modal biasanya lebih sering dikaitkan dengan uang tunai yang biasa digunakan perusahaan untuk melakukan produktif dan investasi. Modal usaha suatu perusahaan berasal dari banyak sumber, biasanya berasal dari operasi bisnis atau didapatkan melalui utang atau pembiayaan ekuitas.

##### a. Jenis-jenis Modal

- 1) Modal berdasarkan sumbernya, yaitu modal yang terbagi menjadi modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal dari laba perusahaan. Modal eksternal adalah modal yang diperoleh selain dari kekayaan perusahaan, contohnya modal melalui investor atau kreditur.
- 2) Modal berdasarkan pemiliknya, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan adalah modal pribadi, sedangkan modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat secara umum dalam melakukan aktivitas bisnis.
- 3) Modal berdasarkan wujudnya, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud, sedangkan modal pasif adalah kebalikannya.
- 4) Modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan untuk produksi beberapa kali (jangka panjang) dan waktu yang berulang,



sedangkan modal lancar adalah modal yang habis terpakai dalam sekali proses produksi.

- b. Secara umum manfaat modal bagi perusahaan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Manfaat Modal
    - a) Sebagai penyediaan bahan baku
    - b) Digunakan untuk melakukan proses produksi
    - c) Sebagai simpanan dan dana cadangan
    - d) Mengurus hak paten
    - e) Meningkatkan kepercayaan pihak lain
    - f) Memenuhi keperluan lainnya.

### 2.1.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha.

Menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), Jasa penampungan tagihan (*collection*), jasa penitipan barang (*save deposit box*), dan lain sebagainya. Jasa yang ditawarkan sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

#### a. Kegiatan Usaha Bank Umum

Adapun beberapa kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum diantaranya:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya.
- 2) Mengeluarkan kredit.

- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin risiko yang ada, baik itu risiko sendiri atau untuk kepentingan dan atas perintah dari nasabah.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank atau kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, dan sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank (tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku).

Secara singkat kegiatan usaha Bank Umum dapat dilihat pada struktur di bawah ini:



Gambar 2.1 Fungsi Bank

(Sumber: Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi))

b. Jenis-Jenis Bank Umum

- 1) Bank Umum berdasarkan kegiatan operasional dibedakan menjadi:
  - a) Bank Umum devisa, yaitu Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Contohnya yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB, dan Bank Danamon.
  - b) Bank Umum Non Devisa, yaitu Bank Umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contohnya BCA Syariah, Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah.
- 2) Bank Umum berdasarkan status kepemilikan dibedakan menjadi:
  - a) Bank Milik Negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Contohnya, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Tabungan Negara.
  - b) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang kepemilikan seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pemimpinnya terdiri atas warga negara Indonesia. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Bumi Putera, Bank Lippo, Bank Mega, dan lain sebagainya.
  - c) Bank Swasta Asing, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia, baik milik swasta asing atau pemerintah asing dan operasionalnya hanya dilakukan di lima kota besar Indonesia. Contohnya, *Citibank*, *HSBC*, *ABN*, *Rabobank*, dan *Commonwealth*.
  - d) Bank Milik Campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak yaitu dalam dan luar negeri. Contohnya, *Inter Pacific bank*, *Ing Bank*, *Sanwa Indonesia Bank*, *Mitsubishi Buana Bank*, *Bank Merincorp*, dan lainnya.

### 2.1.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. KUR dikeluarkan secara resmi pada tanggal 5 November 2007. KUR dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Tujuan lain dari adanya program KUR ini adalah menjadi salah satu bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperkuat permodalan usaha melalui kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Lembaga keuangan khusus bank memiliki syarat tersendiri dalam menjalankan program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), namun persyaratan umum untuk mendapatkan KUR adalah pelaku usaha harus memiliki usaha yang produktif dan layak. Usaha produktif yang dimaksud adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, sedangkan usaha yang disebut layak adalah usaha yang dapat memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan dapat mengembalikan seluruh kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.



Gambar 2.2 Kriteria Penerima, Tujuan, dan Kemudahan KUR  
(Sumber: kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan)

Beberapa lembaga keuangan seperti Bank, memiliki produk layanan Kredit Usaha Rakyat tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, ada beberapa jenis pembiayaan KUR yang dikeluarkan agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha diantaranya:

1) Kebijakan KUR

Pada periode 2015-2020 kebijakan skema Subsidi Bunga/Margin ditetapkan. Pada periode ini adanya dukungan pemerintah bagi pembiayaan UMKM sehingga skema KUR berubah yang sebelumnya skema imbal jasa penjamin menjadi skema subsidi bunga/margin. Melihat skema ini pemerintah akhirnya menanggung sebagian bunga dari debitur. Subsidi bunga diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur.

Pada awalnya penetapan suku bunga yang ditetapkan sebesar 12% diturunkan menjadi 9% oleh pemerintah melalui komite kebijakan penetapan suku bunga. Penetapan suku bunga KUR menjadi *single digit* sebagaimana dijelaskan, dimaksudkan untuk mendorong perbankan di Indonesia agar menetapkan suku bunga kredit menjadi *single digit*. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ditetapkan suku bunga KUR sebesar 6%.

Kebijakan KUR berubah di masa pandemi *covid-19*. Setelah ditetapkan menjadi bencana nasional, pada bulan Maret 2020 kebijakan penyaluran KUR diubah menjadi:

- a. Adanya subsidi bunga sebesar 6% sehingga beban bunga yang ditanggung debitur KUR selama masa pandemi adalah 0% sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. Adanya penundaan target penyaluran KUR di bagian sektor produksi pada tahun 2020-2021.
- c. Adanya relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan terkait administrasi restrukturisasi KUR.
- d. Adanya perpanjangan dan pemberian terkait tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% pada periode 1 Januari-31 Desember 2021.

Selain itu pada tahun 2022, penetapan kebijakan baru oleh pemerintah terkait dengan KUR, diantaranya:

- a. Peningkatan plafon KUR menjadi Rp 737,17 triliun
- b. Relaksasi kebijakan KUR pada masa *covid-19*
- c. Perubahan kebijakan KUR untuk memperluas dan meningkatkan penyaluran KUR

Pada tahun 2023 kuota pendanaan KUR sebesar Rp460 triliun dengan bunga 6% khusus untuk UMKM. Adapun plafon yang diberikan maksimal sebanyak Rp500.000.000 untuk setiap individu. Pada tahun 2023 bahwa pedoman pelaksanaan KUR sebagaimana telah ditetapkan aturan terbarunya dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2020 menerapkan sistem bunga bertingkat.

## 2) Jenis-jenis KUR

### a. KUR Mikro

KUR mikro yaitu kredit modal kerja atau investasi dengan plafon sampai dengan Rp25.000.000 per debitur. Selain itu jangka waktu KUR Mikro paling lama 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

### b. KUR Kecil

KUR Kecil yaitu kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafon > Rp25.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per debitur. Untuk jangka waktu KUR Kecil paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

### c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KUR jenis ini diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafon sampai dengan Rp25.000.000. Untuk jangka waktu KUR ini paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

### d. KUR Khusus

KUR Khusus yaitu kredit modal kerja atau investasi yang diperuntukkan khusus bagi komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. Plafon KUR Khusus

>Rp25.000.000 dan maksimal Rp500.000.000 setiap individu anggota kelompok. Selain itu jangka waktu KUR Khusus paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Selain itu ada berbagai sektor yang bisa dibiayai oleh KUR. Berikut beberapa sektor yang dapat dibiayai oleh KUR, diantaranya:

- a. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan  
Seluruh usaha di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
- b. Sektor Kelautan dan Perikanan  
Seluruh usaha di sektor kelautan dan perikanan (termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan).
- c. Sektor Industri Pengolahan  
Seluruh usaha di sektor industri pengolahan (termasuk industri kreatif di bidang periklanan, *fashion*, *film*, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan).
- d. Sektor Konstruksi  
Seluruh usaha di sektor konstruksi (termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan, perairan, dan lain sebagainya).
- e. Sektor Perdagangan  
Seluruh usaha di sektor perdagangan besar dan eceran (termasuk kuliner dan pedagang eceran).
- f. Jasa Produksi  
Seluruh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, sektor *real estate*, usaha persewaan, jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat melalui kantor cabang/pembantu bank pelaksana. Penyaluran KUR secara tidak langsung melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USP koperasi atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

#### **2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 6) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 7) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 8) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 9) Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 10) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 11) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 12) Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- 13) Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
- 14) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 15) Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

### 2.1.5 Suku Bunga

Menurut Dahlan Siamat (2014:139), suku bunga adalah cerminan siap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Menurut Boediono (2014:76), tingkat suku bunga adalah salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Secara sederhana bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman).

#### 1) Jenis-jenis Suku Bunga

Dalam industri perbankan, terdapat 5 jenis suku bunga, yaitu:

- a. Suku Bunga Tetap (*Fixed*) merupakan suku bunga yang sifatnya tetap atau tidak berubah sampai jangka waktu tanggal jatuh tempo (selama waktu kredit).
- b. Suku Bunga Mengambang (*Floating*) merupakan suku bunga yang selalu berubah tergantung suku bunga yang ada di pasaran.
- c. Suku Bunga *Flat* merupakan suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan dan digunakan pada periode jangka pendek.
- d. Suku Bunga Efektif  
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit suku bunga yang harus dibayarkan.
- e. Suku Bunga Anuitas  
Suku bunga ini dihitung dengan metode mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.

## 2) Teori Suku Bunga

### a. Teori Klasik

Menurut Teori Klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada *investable fund* yang bersumber dari tabungan.

### b. Teori Keynesian, Preferensi Likuiditas

Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori *liquidity preference*. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang.

## 2.1.6 Inflasi

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan tingkat inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) di Indonesia. Melalui survei BPS data harga berbagai macam barang dan jasa yang dianggap menjadi produk belanja konsumsi masyarakat secara umum. Data tersebut digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan data harga produk saat ini dengan data harga produk periode sebelumnya.

### a. Pengukuran IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)* 2018, IHK dikelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran, diantaranya:

- 1) Kelompok makanan, minuman, dan tembakau
- 2) Kelompok pakaian dan alas kaki
- 3) Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga
- 4) Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
- 5) Kelompok kesehatan

- 6) Kelompok transportasi
  - 7) Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
  - 8) Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
  - 9) Kelompok pendidikan
  - 10) Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran
  - 11) Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
- b. Macam-macam Inflasi
- 1) Inflasi Berdasarkan Dampak Ekonomi
    - a) Inflasi ringan, yaitu inflasi yang dapat dikendalikan dan tidak mengganggu perekonomian suatu negara.
    - b) Inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan penghasilan tetap, namun tidak membahayakan aktivitas negara.
    - c) Inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak ingin menabung disebabkan oleh tingkat inflasi lebih tinggi dari suku bunga yang ada.
    - d) Inflasi sangat berat (*hyperinflation*), yaitu tingkat inflasi yang sangat sulit untuk dikendalikan meskipun diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
  - 2) Inflasi Berdasarkan Penyebabnya
    - a) *Demand pull inflation*, inflasi jenis ini disebabkan oleh permintaan barang atau jasa lebih tinggi dari kemampuan produsen.
    - b) *Cost push inflation*, inflasi jenis ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi barang dan jasa secara pesat.
    - c) *Bottle neck inflation*, inflasi jenis ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran.
  - 3) Inflasi Berdasarkan Sumbernya
    - a) Inflasi dari domestik, yaitu jenis inflasi yang terjadi dan bersumber dari dalam negeri.
    - b) Inflasi berasal dari luar negeri, yaitu jenis inflasi yang disebabkan oleh harga barang-barang impor atau barang dari luar negeri semakin mahal.

c. Pentingnya Kestabilan Harga

Pengendalian inflasi sangat penting dengan mempertimbangkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi diantaranya, pertama inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil suatu masyarakat akan turun secara terus menerus sehingga kesejahteraan hidup masyarakat akan menurun. Kedua dengan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan baik itu keputusan dalam melakukan konsumsi, investasi, atau produksi yang berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga mengakibatkan terjadinya perbandingan yang tidak kompetitif terhadap tingkat suku bunga domestik riil dan berimbas pada nilai rupiah. Keempat, dengan menjaga kestabilan harga akan selaras dengan menjaga stabilitas sistem keuangan.

d. Pengendalian Inflasi

Kebijakan moneter yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia diberlakukan untuk pengelolaan terhadap tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Respon kebijakan moneter tidak berlaku terhadap kenaikan inflasi bersifat sementara (*temporer*) dan akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Jika dilihat dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok *Volatile Food* dan *Administered Prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eni dan Kadir (2017) Faktor-faktor yang Mempengaruhi pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar	Suku Bunga (X1), Administrasi dan Pelayanan (X2), Lingkungan/ Rekomendasi (X3), Jangka Waktu (X4), dan Pengambilan KUR (Y)	Metode penelitian: Kuantitatif  Pengmupulan data:kuesioner  Analisis data: analisis regresi berganda, uji T, dan uji F	Hasil penelitian ini adalah dari beberapa variabel independen, faktor suku bunga merupakan faktor dominan dalam menentukan pengambilan KUR UMKM di Kota Makassar.
2	Sari & Imaningsih (2022) Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020).	Suku Bunga KUR (X1), <i>Capacity Adequacy Ratio</i> (X2), Inflasi (X3), dan Penyaluran KUR (Y)	Metode penelitian: Kuantitatif  Pengmupulan data:kuesioner  Analisis data: analisis regresi berganda, analisis deskriptif.	Hasil penelitian ini adalah dari seluruh variabel independen, berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020.

## Lanjutan 2.1....

3	<p>Anjani &amp; Purnamasari (2023)</p> <p>Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengajuan KUR Super Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19.</p>	<p>Fasilitas Kredit (X1), Persepsi Kemudahan Pinjaman (X2), Pengetahuan Produk Oleh Nasabah (X3), dan Minat Pengajuan KUR Super Mikro (Y)</p>	<p>Metode penelitian: Kuantitatif</p> <p>Pengumpulan data: kuesioner</p> <p>Analisis data: analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. analisis deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah dari seluruh variabel independen, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat nasabah dalam proses pengajuan KUR super mikro.</p>
4	<p>Huda dkk (2019)</p> <p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Prosedur Kredit, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukowono Arthajaya Jember</p>	<p>Kualitas Pelayanan (X1), Prosedur Kredit (X2), Tingkat Suku Bunga (X3), dan Pengambilan Kredit (Y).</p>	<p>Metode penelitian: Kuantitatif</p> <p>Analisis data: analisis regresi berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah dari seluruh variabel independen, berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam pengambilan kredit pada PT. Bank Perkreditan Sukowono</p>

Lanjutan Tabel 2.1.....

				Arthajaya jember.
5	Efriyenty dan Janrosi (2017)  Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit oleh Pelaku Usaha Kecil Menengah pada Debitur Bank Perkreditan Rakyat Kota Batam	Suku Bunga (X1), Jaminan (X2), Nominal Kredit (X3), Pelayanan Bank (X4), dan Keputusan Pengambilan Kredit (Y).	Metode penelitian: Kuantitatif  Analisis data: analisis deskriptif, uji T, dan Uji F	Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit.

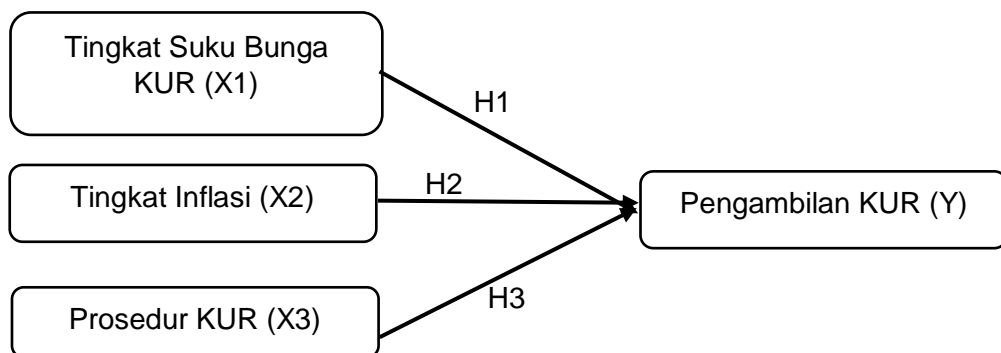


## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka pemikiran akan menentukan alur kerja dalam menyelesaikan permasalahan apa yang diangkat dalam penelitian ini.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual  
(Sumber: Data diolah oleh Peneliti)

#### 3.2. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni *hupo* dan *thesis*. *Hupo* adalah sementara, sedangkan *thesis* adalah pernyataan atau teori. Buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (2021) karya Muhammad Darwin, dkk. Menurut Fraenkel dan Wallen hipotesis adalah prediksi atas kemungkinan dari suatu penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara atau kemungkinan dalam sebuah penelitian yang dapat terjadi dengan melihat pernyataan atau teori.

##### 3.2.1 Hubungan antara Tingkat Suku Bunga terhadap Pengambilan KUR

Suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Penurunan tingkat suku bunga mengakibatkan orang-orang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank dan lebih memilih membelanjakan uang mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eni & Kadir (2017), Sari & Imaningsih (2022), dan Efriyenty & Janrosl (2017)

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan KUR.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara suku bunga dan pengambilan KUR.

### **3.2.2 Hubungan antara Tingkat Inflasi terhadap Pengambilan KUR**

Menurut Marcus, inflasi merupakan sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga barang atau jasa pada umumnya sedang mengalami kenaikan. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi harga barang dan jasa di pasaran sehingga daya beli konsumen melemah. Meningkatnya inflasi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter terkait peningkatan suku bunga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kadarwati & Setiarso (2011), Dewi (2016), dan Sari & Imaningsih (2022) menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan KUR.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat inflasi dan pengambilan KUR.

### **3.2.3 Hubungan antara Prosedur KUR terhadap Pengambilan KUR**

Menurut Tambunan (2013), prosedur merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efriyenti & Janrosi (2017), Anjani & Purnamasari (2023), dan Eni & Kadir (2017) menunjukkan bahwa prosedur KUR memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan KUR.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Terdapat pengaruh signifikan antara prosedur KUR dan Pengambilan KUR.